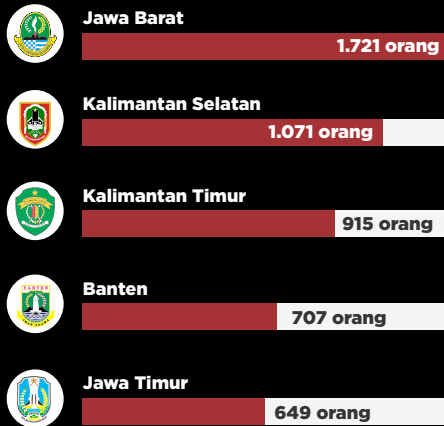




### 5 PROVINSI DENGAN

### JUMLAH PHK TERTINGGI HINGGA MARET 2026



### STRUKTUR KETENAGAKERJAAN INDONESIA

#### (NOVEMBER 2025)

Penduduk Usia Kerja: **218,85 juta orang** ↑ **0,681 juta**

Angkatan Kerja: **155,27 juta orang** ↑ **1,262 juta**

Bekerja: **147,91 juta orang** ↑ **1,371 juta**

- Pekerja Penuh: 100,497 juta
- Pekerja Paruh Waktu: 35,858 juta
- Setengah Pengangguran: 11,558 juta

Sumber: BPS,  
5 Februari 2026.

# DUNIA USAHA MEGAP-MEGAP

## Mei Ragu Bisa Produksi, PHK Mengintai 9 Ribu Pekerja

**D**unia usaha nasional tengah megap-megap. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut gangguan rantai pasok akibat konflik Timur Tengah membuat bahan baku impor, terutama plastik, langka dan mahal. Kondisi ini membuat pelaku industri ragu bisa mempertahankan produksi hingga akhir April-Mei. Tekanan ini menghantam sektor makanan-minuman, tekstil, hingga manufaktur. Keadaan makin riskan karena terjadi pelemahan ekonomi dan daya beli. Di sisi lain, Apindo mengungkapkan sebanyak 67% perusahaan tidak berencana melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Di saat yang sama, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian nyata. Sedikitnya 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah mulai melakukan antisipasi dalam tiga bulan ke depan. Dalam perkiraan, potensi terdampak mencapai 9.000 pekerja. Lonjakan biaya produksi dan tekanan efisiensi membuat pekerja--terutama di sektor padat karya--kian rentan kehilangan pekerjaan. Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total PHK sejak awal tahun hingga Maret 2026 sudah mencapai 8.389 orang. **BACA HAL 11...**

Penganggura: **7,35 juta orang** ↓ **0,109 juta**

Bukan Angkatan Kerja: **63,58 juta orang** ↓ **0,580 juta**

Penyerapan Tenaga Kerja (Agu-Nov 2025): **+1,371 juta orang**

### KETERANGA

**Pekerja Penuh**  
Bekerja ≥ 35 jam/minggu

**Pekerja Paruh Waktu**  
Bekerja < 35 jam/minggu,  
tidak mencari/menerima pekerjaan lain.

**Setengah Pengangguran**  
Bekerja < 35 jam/minggu  
mencari/menerima pekerjaan tambahan.



# RUSIA SETUJU PERKUAT KETAHANAN ENERGI RI

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Rusia sepakat memperkuat ketahanan energi Indonesia. Ini merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara, Menteri Energi Rusia Sergey Tsiviliyov mengatakan, kedua pihak bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan.

**P**emerintah Indonesia berhasil mengamankan komitmen tambahan pasokan minyak mentah (crude oil) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Rusia. Kesepakatan strategis ini merupakan hasil diplomasi energi tingkat tinggi guna menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global.

“Dalam pertemuan bilateral tersebut juga disampaikan beberapa hal yang menjadi fokus kerja sama antar kedua negara, di antaranya tentu saja kerja sama ekonomi di berbagai bidang, kerja sama perdagangan, kemudian juga kerja sama di bidang pertanian dan yang terpenting adalah kerja sama di bidang energi, yang diharapkan bisa menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional,” kata Sugiono, dalam keterangan pers, Selasa (15/4/2026).

Ia menambahkan, pertemuan pada Senin (14/4/2026) berlangsung dalam suasana hangat dan cukup intensif. Kedua pemimpin

juga menggelar pertemuan tertutup dalam format makan siang bersama.

“Selain pertemuan bilateral juga dilakukan pertemuan tête-à-tête (pertemuan tertutup, Red) dalam format makan siang bersama yang juga membahas beberapa hal terkait dengan perkembangan geopolitik yang menjadi concern bagi kedua negara,” kata Sugiono.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama. Khususnya di bidang ekonomi.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden

Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow. Dok. Bakom RI.

“Pak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa ditingkatkan dalam kerja sama antara kedua negara khususnya di bidang ekonomi, kemudian juga melanjutkan hubungan-hubungan yang sudah terjalin selama ini antara kedua negara,” ungkap Sugiono.

Ke depan, kedua negara berencana memperkuat hubungan ekonomi serta meningkatkan interaksi antar masyarakat. Selain itu, Presiden Putin menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri



Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, sebagai bagian dari agenda diplomatik Senin (13/4/2026) malam. (ist.Bakom RI)

## Prabowo Bertemu Macron, Bahas Dinamika Global

**PRESIDEN** Prabowo Subianto akan menyampaikan posisi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron. Rencana ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya.

Menurut dia, Prabowo diagendakan menggelar pertemuan empat mata dengan Macron di Istana Élysée. Persamuhan kedua pemimpin negara itu, kata Teddy, nantinya tidak hanya berfokus pada penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dengan dinamika global.

“Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden selain memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Prancis, juga akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia,” kata Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Adapun Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, usai menjalani pertemuan intensif bersama Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Prabowo tiba di Paris

pada Senin malam, 13 April 2026, pukul 23.50 waktu setempat.

“Setelah melakukan pertemuan yang berlangsung selama lima jam dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Bapak Presiden langsung bertolak menuju Prancis dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan tiba tengah malam di Paris,” tutur Teddy.

Menurut Teddy, pertemuan berdurasi panjang antara Prabowo dan Putin memperlihatkan keseriusan Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kemitraan strategis, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan pengembangan industri nasional.

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Rusia telah memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan penting Indonesia di sejumlah bidang

strategis.



Presiden Prabowo Subianto dikatakan kembali diundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri pameran di Rusia, pada Mei dan Juli 2026 mendatang. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono, saat memberikan keterangan pers di Moskow, Selasa (14/4/2026).

“Kemudian Presiden Putin juga menyampaikan undangan bagi Presiden Prabowo untuk menghadiri acara di Kazan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan juga pameran industri besar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang, dalam rangka bagian dari memperkuat hubungan kedua negara yang diharapkan bisa menjadi semakin intensif yang membawa kebaikan bagi kedua belah pihak,” kata Sugiono, mengutip siaran Sekretariat Presiden. (wid,rls,ist/dya)

### LAWATAN LUAR NEGERI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO (AWAL 2026)

#### Januari 2026:

##### Eropa & Timur Tengah


-  **Prancis (23–24 Jan):** Kerja sama industri pertahanan & teknologi
-  **Swiss:** Forum ekonomi, tarik investasi asing

#### Februari 2026: AS &

##### Timur Tengah (17–27 Feb)

-  **Amerika Serikat:** Bahas stabilitas kawasan & kemitraan strategis
-  **Britania Raya:** Kesepakatan 1.582 kapal nelayan & akses pasar
-  **Yordania:** Bantuan kemanusiaan & hubungan bilateral
-  **Uni Emirat Arab:** Investasi energi terbarukan & ketahanan pangan

#### April 2026 (Berlangsung)

-  **Rusia:** Negosiasi energi & teknologi nuklir sipil

sejumlah agenda penting di Rusia.

“Presiden Putin juga menyampaikan undangan bagi Presiden Prabowo untuk menghadiri acara di Kazan pada bulan Mei dan juga pameran industri besar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang,” ujar Sugiono.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, “Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin.”

“Alhamdulillah, dari hasil kesepakatan tersebut kita mendapatkan hasil yang cukup baik. Kita bisa mendapatkan tambahan cadangan crude dan juga LPG,” ujar imbuh Menteri ESDM.

Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama ini dijajaki melalui skema antarpemerintah (Government to Government/G2G) maupun bisnis (Business to Business/B2B). Indonesia juga membuka ruang kolaborasi jangka panjang untuk memastikan stabilitas stok energi domestik dari fluktuasi harga dunia. (wid,rls,ant/dya)

# MK MENYOAL DANA MBG DARI ANGGARAN PENDIDIKAN DPR Bersikukuh Sudah Tepat

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa secara mendalam permohonan pengujian konstitusionalitas pengalokasian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Pemohon berargumen, manuver fiskal pemerintah dan DPR secara administratif telah menyulap angka anggaran pendidikan demi program MBG. Jika dihitung, dana pendidikan hanya tersisa sekitar 11,9 persen, jauh di bawah mandat 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

**D**alam sidang lanjutan pengujian materiil perkara Nomor 40, 52, serta 55/PUU-XXIV/2026 dengan agenda mendengarkan pandangan dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, Selasa (14/4/2026) di Gedung MK, Jakarta, Majelis Hakim mencecar pemerintah dan DPR mengenai argumen rasionalitas serta dasar yuridis di balik keputusan kebijakan tersebut.

Ketiga Pemohon perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026, menguji Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 serta Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terhadap UUD 1945.

Secara rinci, Reza Sudrajat yang merupakan Pemohon perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026) berargumen



Anggota DPR RI, I Wayan Sudirta, dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/4/2026). (dpr.go.id)

manuver fiskal pemerintah dan DPR secara administratif "menyulap" angka anggaran pendidikan demi program MBG. Menurutnya, jika pendanaan MBG dikeluarkan dari komponen pendidikan, realokasi anggaran pendidikan murni

hanya tersisa sekitar 11,9 persen, jauh di bawah mandat 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Kekhawatiran akan degradasi kualitas pendidikan juga disuarakan

oleh Rega Felix, Pemohon perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026). Ia menyoroti bahwa pengelompokan MBG sebagai biaya operasional pendidikan tidak hanya mengabaikan kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik, tetapi juga berpotensi memangkas alokasi untuk riset serta infrastruktur esensial lainnya.

Sementara Pemohon atas Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026) yakni Yayasan Taman Belajar Nusantara dkk, menegaskan kebijakan ini secara drastis menyempitkan ruang fiskal bagi fungsi inti pendidikan. Mereka menilai, dengan dalih "operasional pendidikan," negara justru sedang mengurangi prioritas bagi peningkatan kualitas guru serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

DPR menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG ke dalam pos anggaran pendidikan adalah langkah yang sah secara substantif. Hal ini didasari argumen bahwa target manfaat utama program tersebut adalah peserta didik yang merupakan komponen inti dalam sistem pendidikan nasional.

"Panganggaran pendanaan program makan bergizi dalam pos anggaran pendidikan merupakan konsekuensi logis mengingat salah satu target manfaatnya ialah peserta didik, sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional," ujar Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta mewakili DPR, di ruang sidang MK.

Wayan menjelaskan bahwa DPR memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya terbatas pada proses belajar-mengajar, tetapi juga mencakup kesiapan fisik siswa agar mampu menyerap ilmu dengan maksimal. (gus,tir,ist/dya)

## Hakim: Gizi Kok Masuk Pos Pendidikan?

**MAJELIS** Hakim Konstitusi menanggapi keterangan dari Pemerintah dan DPR secara kritis. Mereka menekankan bahwa para Pemohon bukan mempersoalkan program MBG andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan menguji konstitusionalitas masuknya anggaran MBG dalam mata anggaran wajib untuk pendidikan dalam APBN.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, mempertanyakan alasan pemerintah meletakkan pos anggaran program MBG ke dalam anggaran pendidikan, alih-alih mengintegrasikannya di pos anggaran kesehatan.

Ia menilai ada ketidakkonsistenan peletakan anggaran, dimana MBG untuk anak sekolah dibebankan pada anggaran pendidikan, sedangkan program yang sama untuk ibu hamil, menyusui, dan balita dimasukkan ke kesehatan.

"Mengapa tidak kemudian masuk ke posnya karena gizi misalnya ke kesehatan semua begitu? Mengapa kemudian muncul pembidangan ada yang kemudian MBG anak itu ke pendidikan kemudian anggarannya

diambil di situ, kemudian untuk ibu hamil ke kesehatan? Sementara esensinya sama-sama makan bergizi gratis itu," ungkap Enny kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirmansyah.

Lebih jauh, Enny menyinggung soal mandat Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 terkait kewajiban konstitusional pemerintah membiayai hak atas pendidikan dasar secara gratis. Ia mempertanyakan apakah kewajiban negara tersebut sudah terpenuhi atau malah jadi tereduksi karena dananya ditarik untuk membiayai program makan bergizi.

"Apakah ada yang kemudian terambil atau berkurang dari kewajiban konstitusional tersebut dengan adanya kebijakan MBG yang posnya diletakkan di anggaran pendidikan?" tegasnya meminta penjelasan.

Sorotan Enny tidak berhenti di poster APBN saat ini saja. Merujuk pemaparan pemerintah mengenai target pentahapan MBG yang mencapai 100 persen hingga tahun 2029, Enny mengkritisi rencana pembentukan Undang-Undang Pemenuhan Gizi Nasional. Ia

menuntut kejelasan mengenai desain penganggaran ke depan jika undang-undang tersebut disahkan.

"Apakah ini juga sudah tergambar mengenai pos penganggarnya seperti apa? Apakah pembedaannya masih pola yang digunakan dalam Perpres [terkait MBG], anak itu kemudian larinya ke anggaran pendidikan sementara kemudian untuk ibu hamil, menyusui dan seterusnya itu ke-pada anggaran ke-sehatan?," cecar Enny.

Senada dengan Enny, Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah, turut mendesak penjelasan rasional dari pihak DPR dan Pemerintah. Guntur membeberkan hitung-hitungan poster APBN 2026, dimana total anggaran pendidikan menyentuh angka Rp769,1 triliun, sementara alokasi untuk MBG di dalamnya mencapai Rp223,6 triliun. (gus,tir,ist/dya)



Potret salah satu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda yang ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).ist

# SEKJEN DPR MENANG PRAPERADILAN, STATUS TERSANGKA KPK GUGUR

**Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, meraih kemenangan dalam gugatan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan komisi anti-rasuah untuk mencabut status tersangka yang sebelumnya disematkan kepada Indra.**

**H**akim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Sekjen DPR, Indra Iskandar. Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Indra yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon merupakan perbuatan sewenang-wenang.

"Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan sebagian," ujar hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Indra tidak sah secara hukum.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan sebagai tersangka oleh termohon terhadap pemohon Indra Iskandar," lanjutnya.

Sebelumnya, Indra ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota



Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar (kanan) berjalan ke luar ruangan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Dok.ANTARA

DPR RI untuk tahun anggaran 2020.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa langkah KPK dalam menetapkan Indra sebagai tersangka dilakukan secara sewenang-wenang.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan," kata hakim.

Tak hanya itu, hakim turut memerintahkan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri yang sebelumnya diajukan KPK melalui

pihak Imigrasi. Dengan demikian, penekalan terhadap Indra untuk ke luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Respons KPK

Menanggapi putusan praperadilan tersebut, KPK menyatakan sikap menghormati keputusan hakim.

"KPK menghormati putusan hakim dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Saudara IS (Indra Iskandar), sebagai salah satu due

process of law khususnya dalam menguji aspek formil penyidikan perkara ini," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

KPK juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut pertimbangan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar dalam putusan tersebut guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Mengingat, putusan praperadilan bukan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat kecukupan alat bukti, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Indra Iskandar. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan anggota DPR.

Hingga kini, KPK belum merinci secara lengkap konstruksi perkara tersebut. Namun, dugaan sementara mengarah pada praktik mark-up dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan anggota DPR yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan penelusuran, terdapat sedikitnya empat tender pengadaan perlengkapan rumah anggota DPR RI yang tercatat di laman LPSE pada tahun 2020. Tiga di antaranya berada di kawasan Kalibata, Pancoran, serta satu lainnya di Ulujami, Pesanggrahan--seluruhnya berlokasi di Jakarta Selatan. (wid,ist,rls/dya)



## KPK Sita USD 1 Juta, Diduga Terkait Yaqut di Kasus Kuota Haji

penghubung dalam proses penyerahan uang kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.

"Fakta yang kami temukan, ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang kepada anggota pansus," kata Taufik di Jakarta, Senin (13/4/2026) malam.

Penyidik memastikan bahwa uang tersebut kini telah diamankan sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, dana dalam bentuk pecahan dolar AS itu diketahui belum sempat dimanfaatkan.

"Sejauh ini yang kami dalam dan tertuang dalam berita acara, uang itu belum sampai digunakan," ujar Taufik.

Berdasarkan temuan sementara, dana tersebut masih berada di tangan

ZA lantaran proses penyerahan belum rampung dan masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum sampai kepada pihak yang dituju di Pansus Haji.

"Uang itu belum sampai ke pihak yang dituju di pansus, sehingga masih berada di perantara, yaitu saudara ZA," tuturnya.

Taufik menegaskan bahwa langkah penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan hilangnya barang bukti atau berpindah tangan. "Kami sudah lakukan upaya untuk mengamankan barang bukti, sehingga uang tersebut telah kami sita," jelasnya.

Selain menelusuri aliran dana melalui perantara, KPK juga tengah mendalami keterlibatan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji dan umrah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau pihak travel yang diduga menerima aliran dana dari kuota tambahan tahun 2023-2024 agar segera mengembalikannya kepada negara.

"Kami tentu mengimbau kepada para PIHK ataupun biro travel yang masih ragu untuk mengembalikan uang ataupun aset, yang diduga bersumber dari pengelolaan kuota haji tambahan khusus ini pada 2023-2024, jangan ragu lagi ya," kata Budi, Rabu (1/4/2026).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dua tersangka terbaru yakni Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja/Maktour) dan Asrul Azis Taba (Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri). (wid,ist,ida/dya)



# Dinkes Kota Malang Kaji Imunisasi Lengkap jadi Syarat untuk Siswa Baru



Ilustrasi: Seorang anak mendapatkan imunisasi measles dan rubella (MR) I dan II di Posyandu III Kecamatan Blimbing, Kota Malang. (Santi/Lentera)

**MALANG** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang tengah mengkaji penerapan penyertaan bukti imunisasi lengkap, sebagai persyaratan bagi calon siswa baru di tingkat PAUD, TK, hingga SD.

Opsi wacana ini muncul sebagai upaya penguatan pencegahan

penyakit menular, khususnya campak, yang masih ditemukan di wilayah Kota Malang.

"Ini masih dalam kajian kami. Itu memang sudah menjadi pemikiran kami, nanti akan kami kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), kemudian dengan pengampu yang lainnya," ujar Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Selasa (14/4/2026).

Dijelaskannya, menjadikan bukti status imunisasi lengkap sebagai syarat administratif dalam proses pendaftaran sekolah, merupakan opsi yang saat ini tengah dipertimbangkan.

"Sehingga nanti apakah bisa untuk siswa mendaftar baik tingkat PAUD, TK, atau SD, di mana salah satu syaratnya adalah menyertakan bukti status

imunisasinya lengkap," lanjutnya.

Menurut Husnul, imunisasi merupakan langkah utama dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, termasuk campak. Ia menegaskan, perlindungan imun aktif hanya bisa diperoleh melalui imunisasi yang lengkap.

"Karena sampai saat ini, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ya hanya dengan diimunisasi. Termasuk campak. Karena imunisasi ini memberikan kekebalan secara aktif," tegasnya.

Husnul juga menyoroti kelompok sasaran imunisasi, yakni anak usia 9 bulan hingga 13 tahun, yang dinilai sangat rentan karena aktivitas dan mobilitas yang tinggi serta interaksi sosial yang luas.

Ia menambahkan, risiko penularan penyakit juga dapat terjadi pada orang dewasa, meskipun tingkat kerentanannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. "Kalau di orang dewasa, tergantung dari beberapa faktor. Pertama, imunitasnya bagaimana. Kemudian seberapa

banyak atau seberapa sering individu berinteraksi dengan potensi atau masyarakat sasaran yang belum lengkap imunisasinya," jelasnya.

Selain faktor imunitas dan interaksi sosial, kondisi lingkungan juga menjadi faktor penting dalam penyebaran penyakit. Lingkungan padat penduduk serta kondisi rumah yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penularan. "Termasuk asupan gizinya juga," tambah Husnul.

Ia juga menegaskan, cakupan imunisasi yang belum optimal dapat menyebabkan herd immunity atau kekebalan kelompok tidak tercapai, sehingga mempermudah penyebaran virus campak di masyarakat.

Diketahui, berdasarkan data terbaru Dinkes Kota Malang per awal April 2026, tercatat sekitar 61 kasus suspek campak yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Sampling suspek tersebut telah dikirim kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya untuk ditindaklanjuti. (Santi/Dya)

# Anggaran 2026 Ditekan, Pemkab Malang Pastikan Tak Ada PHK PPPK

**MALANG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2026 ini. Kepastian tersebut disampaikan saat efisiensi anggaran terus ditekan.

"Kami sudah berkomunikasi intens dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Inshaallah sampai dengan saat ini, kami belum bahkan tidak ada pikiran untuk melakukan PHK terhadap teman-teman PPPK," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, TAPD masih terus berupaya mencari berbagai skema pembiayaan agar keberlangsungan tenaga PPPK tetap terjaga tanpa harus mengorbankan hak-hak mereka. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di

sektor pelayanan publik.

Nurman menjelaskan, terkait skema pembiayaan tersebut, detail teknisnya berada di ranah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kedua instansi tersebut saat ini tengah menggodok berbagai opsi agar kebutuhan belanja pegawai tetap terpenuhi.

Meski demikian, Nurman mengakui terdapat perbedaan perlakuan terhadap PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Untuk PPPK paruh waktu, kontrak kerja yang berlaku hanya berdurasi 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Ia menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Malang saat ini berkisar sekitar 360 orang. Keberlanjutan kontrak mereka pada tahun-tahun mendatang, lanjut Nurman, masih bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan langsung oleh masing-masing kepala perangkat daerah.

Saat disinggung mengenai

kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak PPPK paruh waktu, Nurman tidak menampik adanya potensi tersebut.

Namun ia kembali menegaskan sepanjang tahun 2026, belum ada rencana untuk melakukan PHK, termasuk bagi PPPK paruh waktu.

"Inshaallah untuk 2026 ini kami tidak melakukan PHK PPPK, termasuk paruh waktu. Tapi semua kembali pada evaluasi," imbuhnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran daerah memang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi penurunan pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Malang pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp644,4 miliar atau turun 16,93 persen dibandingkan saat penyampaian RAPBD.

Kondisi tersebut jelas memengaruhi kemampuan fiskal



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah. (Santi/Lentera)

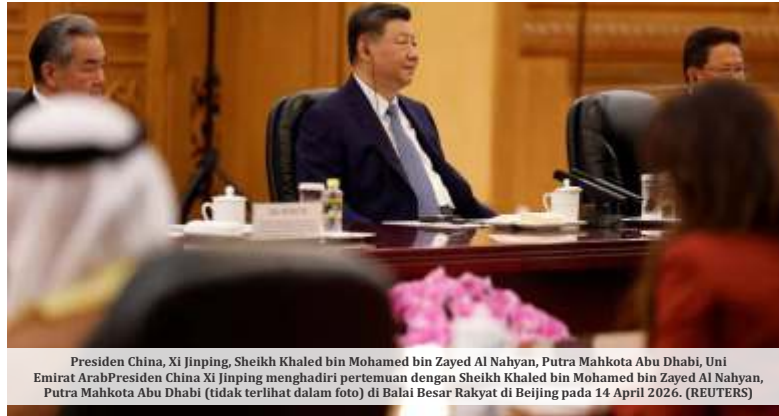
daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk belanja pegawai. Meski demikian, Nurman menegaskan pemerintah daerah berupaya menutup celah tersebut dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2026, target PAD Kabupaten Malang diproyeksikan naik menjadi Rp1,22 triliun dari sebelumnya Rp1,21 triliun pada 2025. (Santi/Dya)

# HARI PERTAMA BLOKADE AS, TANKER CHINA TEROBOS SELAT HORMUZ

Ketegangan di jalur perdagangan minyak dunia, Selat Hormuz, memasuki babak baru, Selasa (14/4/2026). Pada hari pertama blokade ketat diberlakukan Amerika Serikat (AS), sebuah kapal tanker milik perusahaan China dilaporkan berhasil menerobos keluar dari kawasan Teluk. Langkah ini dianggap sebagai tantangan terbuka terhadap dominasi sanksi Washington di perairan tersebut.

**D**ata yang dihimpun dari LSEG, MarineTraffic, dan Kpler menunjukkan kapal tanker bernama Rich Starry tersebut menjadi armada pertama yang sukses menembus titik rawan itu sejak blokade dimulai. Kapal ini bukan kapal sembarang dalam daftar pantauan intelijen maritim. Diungkapkan, Rich Starry dan pemiliknya, Shanghai



Presiden China, Xi Jinping, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Presiden China Xi Jinping menghadiri pertemuan dengan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi (tidak terlihat dalam foto) di Balai Besar Rakyat di Beijing pada 14 April 2026. (REUTERS)

Xuanrun Shipping Co Ltd, telah masuk dalam daftar hitam sanksi Amerika karena rekam jejak mereka yang terafiliasi dengan perdagangan energi Iran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak

Shanghai Xuanrun Shipping belum memberikan respons atas manuver armadanya. "Rich Starry adalah kapal tanker jarak menengah yang membawa sekitar 250.000 barel metanol di dalamnya," demikian

petikan data teknis yang dirilis otoritas pelacakan kapal tersebut.

Berdasarkan riwayat perjalanannya, kapal berawak warga negara China ini memuat kargo terakhirnya di Pelabuhan Hamriyah, Uni Emirat Arab. Keberhasilan Rich Starry melintasi blokade diyakini akan memicu reaksi keras dari Pentagon, mengingat AS sedang memperketat pengawasan terhadap setiap pergerakan komoditas yang berkaitan dengan Teheran.

Namun, Rich Starry tidak sendirian dalam aksi "main kucing-kucingan" di perairan internasional ini. Radar pemantau juga menangkap pergerakan kapal tanker lain yang juga berstatus dalam sanksi AS, Murlikishan. Kapal berjenis handysize yang sedang dalam kondisi kosong itu terpantau bergerak menuju Selat Hormuz pada hari yang sama.

Informasi dari Kpler menyebutkan bahwa Murlikishan, yang sebelumnya beroperasi dengan nama MKA, dijadwalkan akan memuat bahan bakar minyak di Irak pada 16 April mendatang. Kapal ini memiliki catatan merah dalam dokumen keamanan maritim Barat karena kerap digunakan untuk mengangkut minyak dari Rusia dan Iran.

## Xi Jinping: Tatanan Dunia Kacau

Presiden Xi Jinping menyebut tatanan global pimpinan Barat sedang menuju kekacauan. Di Beijing, ia menawarkan proposal empat poin untuk meredakan bara di Timur Tengah.

Hal itu diungkapkan di hadapan para pemimpin dunia yang bertandang ke Beijing, Selasa (14/4/2026)

Dalam pernyataan perdana pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sebulan silam, Xi memotret kondisi dunia yang ia sebut tengah berada dalam fase "kekacauan" yang mengkhawatirkan.

"Tatanan internasional sedang runtuh ke dalam kekacauan," tegas Xi saat menerima Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, di Beijing. Istilah yang digunakan Xi tak sekadar merujuk pada disrupsi fisik akibat perang, namun secara tersirat menyentuh kemerosotan moral dalam tata krama hubungan antarnegara. Pernyataan ini dinilai sebagai posisi diplomasi China yang paling keras dalam mengkritik dominasi Barat.

Di tengah eskalasi yang mengganggu aliran energi global, Xi memosisikan China sebagai kekuatan penyeimbang. Saat bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed, ia menegaskan niat Beijing untuk terus memainkan "peran konstruktif" demi meredakan gejolak yang telah menelan ribuan korban jiwa di Timur Tengah. (wid,rtr,ana,ist/dya)

## KEKUATAN MILITER (DATA 2024)

### Personel Militer & Paramiliter

- Amerika Serikat: 2.111.800 orang
- Iran: 960.000 orang
- Israel: 634.500 orang

### Satelit

- Amerika Serikat: 263 unit
- Israel: 4 unit
- Iran: 1 unit

### Radar

- Amerika Serikat: 107 unit
- Iran: (Tidak disebutkan)
- Israel: (Tidak disebutkan)

### Pertahanan Udara

- Amerika Serikat: 921 unit
- Iran: 410 unit
- Israel: 40 unit

### Rudal & Senjata Artileri

- Amerika Serikat: 6.540 unit
- Iran: 6.798 unit
- Israel: 530 unit

### Helikopter

- Amerika Serikat: 5.253 unit
- Iran: 275 unit
- Israel: 145 unit

## Iran Gugat 5 Negara Teluk, Dituding Fasilitasi AS-Israel

bahwa tindakan kelima negara tersebut telah melanggar kewajiban hukum internasional.

"Dengan tindakan mereka yang melanggar hukum internasional, mereka telah melanggar kewajiban internasional mereka kepada Republik Islam Iran berdasarkan hukum internasional, sehingga menimbulkan tanggung jawab internasional mereka," kata Iravani.

Tuduhan Teheran berfokus pada dugaan bahwa wilayah negara-negara tersebut digunakan sebagai pangkalan atau jalur lintasan serangan sejak 28 Februari 2026. Iran menilai izin penggunaan wilayah--baik darat, laut, maupun udara--merupakan bentuk keterlibatan dalam agresi yang melanggar Piagam PBB.

Atas dasar itu, Iran menuntut kompensasi penuh, termasuk kerugian material akibat serangan. Dalam kerangka hukum internasional, klaim ini merujuk pada prinsip state responsibility, yakni pertanggungjawaban negara yang dianggap membantu tindakan melawan hukum oleh pihak lain.

Namun, hingga pertengahan April 2026, belum ada respons resmi dari

kelima negara yang dituduh. Selama ini, mereka justru konsisten mengutuk serangan Iran ke wilayah mereka dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Di sisi lain, Teheran juga menolak Dewan Keamanan PBB Resolusi 2817 yang disahkan pada Maret 2026. Resolusi yang disponsori Bahrain dan didukung lebih dari 130 negara itu mengancam serangan Iran serta menuntut penghentian segera seluruh operasi militernya di kawasan. Bagi Iran, keputusan tersebut "tidak adil dan tidak dapat dipertahankan secara hukum" karena mengabaikan dugaan keterlibatan pihaklain.

Sementara itu, Uni Emirat Arab sebelumnya menegaskan sikap netral dengan menyatakan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk aktivitas militer yang bermusuhan dengan Iran. Pernyataan ini mencerminkan posisi dilematis negara-negara Teluk yang berada di antara kepentingan keamanan kawasan dan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. (tin,isl,rtr/dya)

**REPUBLIK** Islam Iran membuka babak baru dalam konflik kawasan dengan menempuh jalur hukum internasional. Melalui Duta Besarnya untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, Teheran menuntut ganti rugi kepada lima negara Teluk, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Negara-negara itu diduga terlibat dalam operasi militer Amerika Serikat dan Israel.

Mengutip laporan Islamic Republic News Agency yang juga disiarkan berbagai media internasional, Iravani menegaskan

## STUDI UNGKAP GOLONGAN DARAH B PUNYA RISIKO DIABETES LEBIH TINGGI, BENARKAH?

**G**olongan darah selama ini dikenal berperan penting dalam proses transfusi darah. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa golongan darah juga dapat berkaitan dengan risiko munculnya penyakit tertentu, termasuk diabetes tipe 2.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal BMC Medicine pada tahun 2024 menemukan bahwa individu dengan golongan darah B memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan dengan golongan darah

lainnya. Penelitian tersebut merupakan umbrella review, yaitu metode penelitian yang menggabungkan dan menganalisis berbagai studi sebelumnya. Dalam kajian ini, peneliti menelaah 51 studi sistematis yang membahas hubungan antara golongan darah dan berbagai penyakit. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 270 hubungan yang dianalisis dalam penelitian tersebut.

Dari ratusan penelitian yang dilakukan, hanya satu yang dinilai memiliki bukti paling kuat, yakni keterkaitan antara golongan darah B dan diabetes tipe 2. Temuan ini dianggap paling konsisten berdasarkan data yang tersedia dibandingkan hubungan lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa individu dengan golongan darah B memiliki risiko sekitar 28 persen lebih tinggi untuk mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang memiliki golongan darah non-B.

Risiko ini berlaku pada semua jenis golongan darah B, baik Rh positif maupun Rh negatif. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa peningkatan risiko tersebut tergolong relatif kecil.

Faktor lain seperti pola makan, berat badan, serta tingkat aktivitas fisik tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kemungkinan seseorang terkena diabetes.

Misalnya, kebiasaan kurang bergerak serta konsumsi makanan tinggi gula dan lemak dapat meningkatkan risiko diabetes secara lebih signifikan dibandingkan faktor golongan darah.

Secara ilmiah, golongan darah ditentukan oleh keberadaan antigen pada permukaan sel darah merah. Antigen ini merupakan molekul tertentu yang dapat memicu respons dari sistem kekebalan tubuh. Perbedaan jenis antigen tersebut diduga dapat memengaruhi berbagai proses biologis dalam tubuh, termasuk metabolisme.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis golongan darah dapat berkaitan dengan kadar protein tertentu dalam darah yang berhubungan dengan proses peradangan. Selain itu, golongan darah juga diduga

memengaruhi komposisi bakteri baik di dalam usus. Kondisi tersebut dapat berdampak pada cara tubuh memproses gula serta energi, sehingga berpotensi memengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes.

Meski demikian, sebagian besar hubungan antara golongan darah dan penyakit hingga saat ini belum memiliki bukti yang benar-benar kuat dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut sebelum dapat dijadikan dasar kesimpulan yang pasti. Dari total 270 hubungan yang dianalisis dalam penelitian ini, banyak di antaranya dinilai masih lemah, baik karena ukuran sampel yang terbatas maupun metode penelitian yang kurang konsisten. Selain itu, perbedaan pendekatan dalam setiap penelitian juga dapat memengaruhi hasil yang diperoleh, sehingga diperlukan studi lanjutan dengan data yang lebih besar dan metode yang lebih terstandar agar hasilnya dapat dipercaya secara ilmiah.

Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan golongan darah dengan berbagai penyakit masih terus berkembang dan membutuhkan penelitian lanjutan.

Para peneliti juga menekankan bahwa golongan darah bukanlah penyebab langsung suatu penyakit. Artinya, seseorang tidak serta-merta akan mengalami penyakit tertentu hanya karena memiliki golongan darah tertentu. Informasi

mengenai golongan darah ini lebih tepat digunakan sebagai salah satu faktor tambahan untuk memahami kemungkinan risiko kesehatan, bukan sebagai penentu utama yang mutlak. Dengan demikian, orang yang memiliki golongan darah B tetap memiliki peluang besar untuk mengurangi risiko terkena diabetes. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, serta menghindari kebiasaan yang dapat memicu gangguan kesehatan. Pada akhirnya, kebiasaan hidup sehari-hari tetap menjadi faktor paling penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan serta mencegah terjadinya diabetes tipe 2. (Inna - mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

### Tips mencegah diabetes di usia muda

1. Mengurangi asupan gula berlebihan, seperti minuman manis, soda, maupun makanan yang tinggi gula
2. Rutin berolahraga 30 menit setiap hari untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil
3. Menjaga berat badan ideal untuk mengurangi risiko diabetes
4. Membatasi konsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak dan tinggi gula
5. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
6. Tidur yang cukup agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik
7. Selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala



# Peneliti Temukan Ikan Panjat Air Terjun Kongo



perutnya memiliki tonjolan kecil menyerupai kait yang membantu tubuhnya menempel pada permukaan batu. Dengan cara itu, ikan tersebut dapat merayap perlahan di dinding air terjun yang tingginya mencapai sekitar 15 meter.

Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata ikan memerlukan waktu sekitar 9 jam 45 menit untuk menuntaskan perjalanan memanjat air terjun tersebut. Meski begitu, sebagian besar waktu justru dihabiskan untuk beristirahat.

Selama pendakian, ikan-ikan itu tercatat berhenti sebanyak sembilan kali dengan jeda cukup lama, masing-masing sekitar satu jam.

Selain itu, terdapat pula beberapa jeda singkat. Jika dihitung, total waktu yang benar-benar digunakan untuk bergerak hanya sekitar 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak bergerak terburu-buru saat memanjat.

Jeda panjang biasanya dilakukan di bagian tepi batu yang relatif datar. Area ini memungkinkan ikan berhenti sepenuhnya tanpa harus terus menempel menggunakan siripnya. Dalam jumlah cukup banyak, ikan-ikan tersebut terlihat berkumpul di titik-titik datar itu sebelum kembali melanjutkan pendakian.

Pada awal April, yang diperkirakan sebagai awal periode migrasi, jumlah ikan yang mencoba memanjat air terjun masih relatif sedikit. Kondisi ini diduga berkaitan dengan debit air yang saat itu masih berada pada tingkat tertinggi.

Seiring berjalannya waktu, jumlah ikan yang melakukan pendakian meningkat dan mencapai puncaknya pada pertengahan April.

Periode migrasi tersebut diperkirakan berakhir pada awal Mei, bertepatan dengan menurunnya permukaan air menjelang akhir musim hujan. (Ella- mahasiswa UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)

**T**im peneliti telah menemukan fenomena aneh pada ikan yang dapat memanjat tebing di Republik Demokratik Kongo. Dari balik derasnya aliran air terjun yang indah di Kongo terdapat ribuan ikan kecil yang berenang tidak seperti ikan biasanya.

Melainkan ikan-ikan itu memanjat bebatuan licin setinggi 15 meter dalam perjalanan berat yang dapat memakan waktu hingga 10 jam. Peneliti menemukan perilaku unik pada ikan jenis shellear (*Parakneria thysi*) yang mampu memanjat dinding batu curam

di Air Terjun Luvilombo, Kongo. Ikan kecil ini terlihat menapaki permukaan vertikal air terjun yang terjal dengan perlahan.

Pengamatan ilmiah mencatat peristiwa tersebut terjadi empat kali, yakni pada 2018 dan 2020. Menariknya, hanya ikan berukuran sekitar 3,7 hingga 4,8 sentimeter yang terlihat melakukan perjalanan tersebut. Aktivitas ini umumnya terjadi menjelang akhir musim hujan.

Sebenarnya, kemampuan ikan itu sudah lama dikenal masyarakat

setempat secara lisan selama sekitar 50 tahun. Namun, perilaku tersebut baru didokumentasikan dan dilaporkan secara ilmiah dalam penelitian terbaru.

Dalam bahasa Sanga, ikan ini dikenal dengan sebutan kalumba, yang berasal dari kata kerja "kulumba" berarti "menempel". Berbeda dengan beberapa spesies lain, seperti bumblebee catfish yang memanjat dengan bantuan mulut, shellear menggunakan siripnya untuk bergerak. Sirip dada dan sirip



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

magnitudo 9,1  
KORAN DIGITAL TERBIT TERBUKA  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

**MEDIA TERVERIFIKASI**

# Kesalahan Pakai Linen yang Bikin Penampilan Kusut

**K**ain linen dikenal sebagai salah satu bahan favorit, terutama saat cuaca panas. Teksturnya ringan, mampu menyerap keringat dengan baik, serta menghadirkan kesan santai yang tetap elegan. Tak mengherankan jika banyak orang berusia 50 tahun ke atas menjadikan linen sebagai pilihan utama untuk outfit sehari-hari.

Namun di balik keunggulannya, linen juga memiliki tantangan tersendiri dalam hal styling. Jika tidak dipadukan dengan tepat, tampilannya bisa terlihat kurang rapi, bahkan terkesan kusut dan berantakan.

Menurut ahli fashion, linen merupakan bahan yang bernilai tinggi berkat sifatnya yang breathable dan nyaman dipakai. Namun, cara mengatakannya tetap perlu diperhatikan agar tampilan tetap rapi dan stylish.

“Linen memiliki kemampuan menyerap kelembapan dan sangat nyaman dipakai, tetapi styling yang tepat sangat penting,” jelasnya, dilansir Best Life.

## Setrika Sebelum Dipakai

Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah memakai linen dalam kondisi kusut. Memang, bahan ini mudah berkerut karena serat alamnya berasal dari tanaman flax. Namun, bukan berarti dibiarkan begitu saja. Agar tetap terlihat rapi, sebaiknya linen distrika atau di-steam sebelum dikenakan, sehingga tampilannya tetap bersih dan terawat.

“Pastikan pakaian linen disteam atau disetrika agar terlihat rapi, bukan berantakan,” menurut ahli fashion Chantelle Hartman Malarkey.

Selain itu, cara mencuci dan mengeringkan juga berpengaruh pada tampilan akhir linen. Mengeringkannya dengan suhu rendah serta segera menggantung pakaian setelah dicuci dapat membantu meminimalkan kerutan dan menjaga bentuknya tetap rapi.

Pilih Ukuran yang Sesuai  
Kesalahan berikutnya adalah memakai linen dengan ukuran yang terlalu longgar atau justru terlalu ketat. Meski identik dengan gaya santai, linen tetap membutuhkan keseimbangan agar tampilan terlihat proporsional. Oleh karena itu, penting memilih potongan yang pas di tubuh agar tetap nyaman sekaligus rapi.

“Penting untuk memilih pakaian linen dengan potongan yang rapi agar terlihat lebih polished dan flattering,” ujarnya.

Misalnya, saat mengenakan celana linen yang longgar, padukan dengan atasan yang lebih fitted agar siluet terlihat seimbang dan tetap rapi.

## Jangan Padukan dengan Sepatu Berat

Sepatu yang terlalu berat, seperti boots atau model platform, bisa membuat tampilan kurang selaras dengan karakter linen yang ringan. Stylist Brigid Stasen menyarankan untuk memilih alas kaki yang lebih ringan agar keseluruhan outfit terlihat

seimbang dan harmonis.

“Karena linen ringan dan airy, sebaiknya dipadukan dengan sandal, kitten heels, atau flat shoes,” jelasnya.

Dengan memilih sepatu yang tepat, tampilan akan terlihat lebih seimbang dan effortless.

## Tak Pakai Aksesori Berlebih

Linen cenderung memiliki tampilan yang sederhana, sehingga tanpa tambahan aksesori, outfit bisa terlihat terlalu polos atau kurang menarik.

Hal ini menjadi kesalahan yang cukup sering terjadi, terutama bagi mereka yang menginginkan tampilan minimalis. Menurut Cohen, penggunaan aksesori justru penting untuk memberikan karakter dan sentuhan personal pada outfit.

“Tambahkan sentuhan personal melalui aksesori seperti kalung, anting, atau scarf,” sarannya.

Aksesori seperti sabuk tipis atau perhiasan yang simpel dapat mempercantik tampilan tanpa membuatnya terlihat berlebihan.

## Jangan Padukan dengan Bahan Tebal

Kesalahan terakhir adalah memadukan linen dengan bahan yang terlalu tebal atau berat, seperti sweater bulky atau jaket yang berstruktur berat. Kombinasi ini dapat mengganggu keseimbangan visual outfit. Stasen menekankan pentingnya memilih bahan yang lebih seimbang agar tampilan tetap harmonis. “Apa pun yang dipadukan dengan linen sebaiknya memiliki bobot yang sama

atau lebih ringan,” ujarnya. Bahan seperti katun, denim ringan, atau sutra dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dipadukan dengan linen.

Dengan menghindari kelima kesalahan tersebut, kamu tetap bisa tampil stylish tanpa menghilangkan kesan dewasa dan berkelas. Linen bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga bagaimana kamu memakainya dengan percaya diri. (Itqiyah Mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

## Cara Merawat Kain Linen

### Proses Mencuci

Cuci dengan air dingin atau suhu normal (maksimal 30–40°C) agar tidak menyusut. Gunakan deterjen lembut dan hindari pemutih. Disarankan mencuci dengan tangan atau memakai mode gentle pada mesin cuci. Rendam secukupnya saja, sekitar 15–30 menit.

### Cara Mengeringkan

Hindari mesin pengering karena bisa merusak kain. Keringkan dengan cara diangin-anginkan di tempat teduh agar warna tidak pudar. Peras perlahan tanpa dipelintir kuat.

### Menyetrika dan Menyimpan

Setrika saat kain masih sedikit lembap dengan suhu sedang. Lebih baik digantung daripada dilipat agar tidak berbekas. Simpan di tempat kering agar terhindar dari jamur.

**Geger Isu Pesawat AS ,...dari hal 1**

**D**unia usaha nasional tengah berada dalam tekanan berat akibat gejolak global yang kian terasa dampaknya di dalam negeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengungkapkan gangguan rantai pasok (supply chain) akibat konflik di Timur Tengah membuat bahan baku impor semakin langka dan mahal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyebut ketidakpastian produksi kini membayangi pelaku industri.

"Di tengah pelemahan ekonomi, kemudian juga zaman perang Iran, supply chain juga mulai terbatas, ya. Kita enggak tahu nih, April atau Mei kita masih bisa produksi atau enggak. Ini situasi yang kita hadapi saat ini," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, Selasa (14/4/2026).

Ia mencontohkan kelangkaan bahan baku plastik yang kini mulai terjadi di lapangan. "Sebagai contoh, bahan baku plastik sudah enggak ada, sudah langka. Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik," katanya.

Kondisi ini dinilai berisiko menghentikan produksi di berbagai sektor, mulai dari makanan-minuman, tekstil, hingga manufaktur, jika tidak segera diatasi melalui relaksasi impor dan penyederhanaan birokrasi.

Hasil survei menunjukkan 67% perusahaan tidak berencana membuka lowongan pekerjaan. "67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Nah ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan," ujarnya.

Bahkan, sekitar 50% perusahaan disebut tidak memiliki rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, mencerminkan masih lemahnya iklim investasi di dalam negeri, khususnya di sektor padat karya.

Bob menilai kondisi ini menjadi alarm bagi pasar tenaga kerja, mengingat sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bergantung pada sektor padat karya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi padat modal dan padat karya.

"Kita berharap bahwa FDI masuk, padat modal silakan, tapi juga padat karya juga jangan sampai dilupakan," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang dinilai kerap berubah-ubah dan menyulitkan dunia usaha dalam menyusun perencanaan jangka panjang.

"Tetapi kalau regulasinya berubah, kami kesulitan untuk menghitung sebenarnya berapa sih biaya tenaga kerja kita katakanlah untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah ini juga sangat menyulitkan bagi dunia usaha," tegasnya.

APINDO pun berharap regulasi ketenagakerjaan ke depan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, agar iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat kembali membaik.

**10 Perusahaan Berencana Efisiensi**

Tekanan terhadap dunia usaha tersebut mulai merembet ke sektor ketenagakerjaan. Partai Buruh melalui jaringan serikat pekerja mengingatkan potensi gelombang PHK dalam waktu dekat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkapkan sedikitnya 10 perusahaan telah mulai ancap-ancah melakukan efisiensi tenaga kerja.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong

lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," katanya.

Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah, dengan total pekerja terdampak hampir mencapai 9.000 orang. Ia menambahkan tekanan terbesar terjadi di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen yang bergantung pada impor kapas, serta industri elektronik dan otomotif yang banyak menggunakan bahan berbasis plastik. "Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," ujarnya.

Di sisi pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan terus memantau perkembangan situasi ketenagakerjaan yang kian dinamis. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan angka PHK nasional

telah mencapai 8.389 orang hingga Maret 2026.

"Kita terus monitor. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Jadi datanya terus kita monitor. Kita baru mau rapat, nanti kita lihat. Kita ada rapat rutin untuk melihat data dan kemudian bagaimana kita menyikapinya," ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan tren PHK sempat menurun sepanjang kuartal I-2026, dari 4.590 orang pada Januari menjadi 3.273 orang pada Februari, dan 526 orang pada Maret. Namun, secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi sebanyak 1.721 orang, disusul Kalimantan Selatan 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang. Pemerintah menegaskan angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah, seiring laporan pekerja yang mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). (tin,rls,ktn,ist/dya)

# Waswas Rencana Penghentian Restitusi Pajak

**WACANA** penghentian mekanisme restitusi pajak memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha, terutama karena dinilai dapat mengganggu arus kas dan stabilitas operasional perusahaan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia menjadi salah satu pihak yang menyuarakan keberatan, mengingat sektor pertambangan memiliki siklus investasi panjang dan sangat bergantung pada kepastian kebijakan fiskal.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran. "Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik, di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan," ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian hukum dalam mekanisme restitusi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap iklim usaha.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menilai kebijakan penghentian restitusi berpotensi menekan likuiditas perusahaan. "Kebijakan ini berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini

bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak," katanya.

Di tengah kekhawatiran tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memastikan tidak akan menghentikan restitusi, melainkan memperketat pengawasan melalui revisi aturan yang ditargetkan berlaku mulai 1 Mei 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran.

"Jadi sekarang kita perketat. Jadi bukan berarti kita memberhentikan restitusi, tapi kita perketat jangan sampai yang nggak berhak dapat restitusi," ujarnya.

Revisi aturan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang telah melalui proses harmonisasi lintas kementerian. Dalam beleid baru ini, pemerintah menegaskan mekanisme penelitian atas permohonan restitusi sebagai dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Jika syarat terpenuhi, pengembalian pendahuluan dapat diberikan, dengan batas waktu maksimal 3 bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan ini juga akan mencabut sejumlah aturan lama serta diiringi pengawasan lebih ketat, menyusul besarnya nilai restitusi yang mencapai Rp360 triliun pada 2025.

Pemerintah bahkan berencana melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, di tengah dorongan pelaku usaha agar kepastian regulasi tetap terjaga dan tidak mengganggu iklim investasi.

Revisi kebijakan ini tak lepas dari sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap besarnya nilai restitusi pajak pada 2025 yang mencapai Rp 360 triliun. Ia menilai angka tersebut perlu diawasi lebih ketat karena berpotensi menimbulkan kebocoran.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp 360 triliun. Dan laporan ke saya enggak terlalu jelas, dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya saat Raker dengan Komisi XI DPR RI.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak menghentikan kebijakan restitusi, namun akan memperketat pengawasan agar tepat sasaran.

"Jadi sekarang kita perketat. Jadi bukan berarti kita memberhentikan restitusi, tapi kita perketat jangan sampai yang nggak berhak dapat restitusi," ungkapnya. (gus,rls,ant/dya)

# GEGER KEKERASAN SEKSUAL FH UI

## 27 KORBAN SEJAK 2025, 7 DI ANTARANYA DOSEN

Dunia akademik kembali diguncang oleh kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2025. Hingga saat ini, jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 27 orang, terdiri dari 20 mahasiswa FH UI dan 7 dosen.

**K**asus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswa UI dalam grup chat berbuntut panjang. Para pelaku dihadirkan di Auditorium UI pada Senin malam hingga Selasa dini



Poster di pasang di beberapa titik kampus UI menuntut Dekanat FH UI dan Rektorat UI untuk segera memproses kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan 16 mahasiswa FH UI secara transparan dengan sanksi tegas bagi seluruh pelaku tanpa pandang bulu. ANTARA

### Kronologi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI

#### 1. Awal Terungkap

- Viral di media sosial (X) potongan percakapan grup bernuansa seksual
- Berasal dari grup LINE & WhatsApp internal mahasiswa

#### 2. Permintaan Maaf Mencurigakan

- 16 mahasiswa tiba-tiba minta maaf di grup angkatan
- Terjadi pada 11-12 April 2026 dini hari
- Tanpa konteks jelas di awal

#### 3. Pengakuan Pelaku

- Seluruhnya mahasiswa angkatan 2023
- Mengakui perbuatan dalam grup
- Isi chat: lelucon seksual & merendahkan martabat mahasiswi

#### 4. Jumlah Pelaku & Korban

- Pelaku: 16 orang dalam satu grup
- Korban: belum dipublikasikan (demi keamanan)
- Bukti yang beredar: potongan chat

#### 5. Sanksi Organisasi

- Dicaput dari seluruh organisasi & kepanitiaan
- Berdasarkan SK BPM FH UI No. 007/SK/BPMFHUI/IV/2026

#### 6. Respons Kampus

- Fakultas Hukum UI menegcam keras
- Ditangani Satgas PPKS UI
- Proses: verifikasi, pemanggilan, pengumpulan bukti

#### 7. Potensi Sanksi

- Sanksi akademik hingga dikeluarkan
- Bisa berlanjut ke ranah hukum jika ada unsur pidana

#### 8. Sidang Terbuka

- Digelar 14 April 2026 dini hari
- Pelaku disoraki mahasiswa
- Awalnya hanya 2 pelaku hadir

#### 9. Tensi di Lokasi

- Orang tua sempat menahan sebagian pelaku
- Setelah negosiasi, semua hadir
- Tidak terjadi kekerasan fisik

#### 10. Kondisi Korban

- Korban hadir dalam sidang
- Mengalami dampak psikologis mendalam
- Isu sensitif sehingga identitas dilindungi

hari (14/4/2026). Mereka "disidang" hingga berujung permintaan maaf.

"Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025. Jadi saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya mereka

dari tahun 2025. Setiap kali masuk ke kampus, setiap kali masuk kelas, mereka tahu kapan pun para pelaku itu bisa membicarakan mereka, melecehkan mereka, di depan mereka sendiri," tegas Timotius di

## Kecaman Keras Menteri PPPA

Pernyataan tersebut disampaikan Arifah sebagai respons atas mencuatnya kasus pelecehan seksual di FH UI yang ramai diperbincangkan publik, sebagaimana dikutip, Selasa (14/4/2026).

"Kami menegcam keras segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan melalui grup percakapan digital," tegas Arifah.

Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman, terutama di lingkungan akademik.

"Tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya di ruang akademik."

Arifah menegaskan bahwa Kementerian PPPA berkomitmen untuk terus mengawal proses penanganan kasus ini agar para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Setiap bentuk pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan melalui percakapan tertutup di ruang digital,

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun," kata Arifah Fauzi.

Arifah juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil pihak kampus dalam merespons kasus ini. Ia menilai upaya investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) merupakan langkah awal yang penting dalam penanganan kasus.

Menteri Arifatul Choiri Fauzi turut menilai mekanisme internal yang dijalankan kampus menjadi bagian penting dalam memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur.

Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjadi sorotan publik setelah tangkapan layar percakapan sejumlah mahasiswa tersebar luas di media sosial.

Grup percakapan yang beranggotakan 16 mahasiswa tersebut diduga telah terbentuk sejak 2024. Pada awalnya, grup itu hanya digunakan sebagai wadah komunikasi biasa antar penghuni kos. (wid, ant, ist/dya)

Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2026).

Aksi pelecehan tersebut dilakukan oleh 16 mahasiswa FH UI melalui sebuah grup percakapan. Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat adanya percakapan dengan muatan pelecehan seksual yang menasar mahasiswi bahkan dosen.

Hingga saat ini, jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 27 orang, terdiri dari 20 mahasiswa FH UI dan 7 dosen.

Timotius menyebutkan bahwa para korban sempat mengalami keraguan untuk melaporkan kasus ini. Namun setelah melalui proses panjang selama sekitar satu setengah tahun, perkara tersebut akhirnya mencuat ke publik dan mendapat perhatian dari pihak kampus serta masyarakat luas.

"Selama lebih dari 1,5 tahun memperjuangkan kasus ini. Jadi jangan dianggap ini merupakan hanya bocor, bocor yang tidak jelas. Yang hanya tidak begitu saja bocor. Ini perjuangan lebih dari 1 tahun semuanya, dan melihat kasus ini seperti ini, melihat penanganan dari kampus juga, saya menaruh harapan banyak," ungkap Timotius.

Mewakili para korban, Timotius menyampaikan harapan agar para pelaku dijatuhi sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas atau drop out.

"Permohonan kami sederhana, hanya ada satu sanksi. Kami harapkan drop out," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai alasan yang dapat menjadi dasar seseorang dikeluarkan dari perguruan tinggi, mulai dari dianggap tidak layak melanjutkan studi, tidak mampu memberikan rasa aman, hingga dinilai membahayakan lingkungan kampus.

"Saya rasa semua unsur tersebut sudah terpenuhi," ujarnya.

Timotius juga menekankan bahwa pemberian sanksi berat tidak harus menunggu terjadinya pelecehan fisik.

"Jangan ada pemikiran bahwasannya untuk di-drop out kasusnya itu sudah harus sampai yang lebih berat, yang harus sudah pelecehan fisik," tegasnya. (wid, rla ant/dya)

**MENTERI** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan kecaman tegas terhadap dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).